
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN DESA WISATA: Studi Desa Penusupan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Melisa Setiani¹, Eko Sugiyanto²

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nasional

²Program Pascasarjana, Universitas Nasional

email : melisasetiani36@gmail.com, ekoantodr@gmail.com

Korespondensi : ekoantodr@gmail.com

Abstract

This research is based on the low participation and assistance of the Regional Government for the people of Penusupan Village who have a variety of natural and cultural tourism potential. Whereas the empowerment of the tourism village community can make a positive contribution to the development of the Tourism Village as stipulated in the Republic of Indonesia Government Regulation No. 43 of 2014 concerning Regulations for Implementing Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Therefore this study aims to determine the factors that influence community empowerment in supporting the development of tourist villages in the Penusupan Village of Kebumen Regency, Central Java Province. The theory used in this study as proposed by Mardi Yatmo Hutomo (2000), while the research method uses a qualitative approach with the type of descriptive research. The conclusion is that community empowerment in supporting the development of tourism villages in Penusupan Village has generally been done quite well. Nevertheless, the Village Government of the Scope needs to control the organization by increasing the intensity and routine of the assistance and cooperation with various financial and non-financial institutions in all institutions involved in the management of the Village Tourism Village.

Keywords: *community empowerment, tourism village, penusupan village, kebumen regency, jawa tengah*

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh rendahnya partisipasi dan bantuan Pemerintah Daerah bagi masyarakat Desa Penusupan yang memiliki beragam potensi wisata alam dan budaya. Padahal pemberdayaan masyarakat desa wisata dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Desa Wisata sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata di Desa Penusupan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Mardi Yatmo Hutomo (2000), sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kesimpulannya bahwa pemberdayaan masyarakat dalam mendukung

pengembangan desa wisata di Desa Penusupan umumnya telah dilakukan secara cukup baik. Meskipun demikian Pemerintah Desa Penusupan perlu melakukan pengendalian organisasi dengan cara meningkatkan intensitas dan rutinitas pendampingan serta kerja sama dengan berbagai lembaga finansial maupun non finansial pada seluruh kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Penusupan.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, desa wisata, desa penusupan, kabupaten kebumen, jawa tengah

PENDAHULUAN

Kekayaan alam dan keberagaman bangsa Indonesia menyimpan banyak potensi sekaligus peluang untuk membangun kepariwisataan Indonesia agar lebih bergairah di mata dunia serta memiliki karakteristik berdasarkan kearifan lokal. Ini telah dibuktikan bahwa *tagline* "Wonderful Indonesia" mampu meraih penghargaan di UN-WTO AWARD yang dilaksanakan 21 Januari 2016. Dari data Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, tercatat pada 2014 jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 9,4 juta. Pada 2015 tercatat 10,4 juta. Tahun 2016 tercatat 11,5 juta. Tahun 2017 naik cukup signifikan menjadi 14,03 juta. Tahun 2018 tercatat sebanyak 15,8 juta. Per Januari 2019 tercatat 1.158.162 tamu mancanegara berkunjung ke Indonesia. Ada kenaikan kisaran 58 ribu lebih dibandingkan bulan yang sama pada 2018, yang tercatat sebanyak 1.100.677 orang. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting untuk terus menggali dan mengembangkan potensi kepariwisataan, sehingga masyarakat lokal tergugah kesadarannya untuk menggali potensi dan bergerak membangun wilayahnya masing-masing serta turut menunjang pembangunan perekonomian nasional yang mampu menjadi salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi (Dinas Pariwisata DIY, 2014).

Dewasa ini wisatawan mulai menggemari wisata alternatif yang menawarkan kegiatan wisata yang menekankan unsur-unsur pengalaman dan bentuk wisata aktif yang menonjolkan ciri budaya lokal. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dengan mengembangkan potensi desa wisata dengan mengangkat potensi sosial budaya dipercaya dapat memperkuat ketahanan sosial budaya setempat. Berdasarkan pada definisi wisata pedesaan yang dikemukakan oleh Departemen Budaya Pariwisata (DEPBUDPAR) (2001), bahwa wisata pedesaan adalah suatu kegiatan pariwisata yang dikembangkan di suatu wilayah pedesaan dengan menjadikan keseluruhan daya tarik yang dimiliki suatu desa baik dari kehidupan sosial, ekonomi, adat istiadat, arsitektur bangunan dan lainnya sebagai daya tarik utama.

Oleh karenanya, mengacu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberdayaan masyarakat di desa-desa wisata. Desa Penusupan merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang beragam. Dengan luas wilayah 179,74 hektar dan jumlah penduduk

mencapai sebanyak 1.567 jiwa, Desa Penusupan merupakan salah satu sentra penghasil jenitri dan daerah pengrajin cobek batu yang sudah dikenal masyarakat luas, serta dikenal dengan wisata religinya yaitu Petilasan Syekh Jambu Karang dan Jembatan Cinta, dan Rumah Pohon Igir Wringin, Puncak Batur, Susur Kali Watu Mujur di Wanatirta, Curug Pesantren, Petilasan Syekh Ardilawet ke Puncak Sendaren, dan sebagainya. Sepanjang tahun 2015, Desa Panusupan telah dikunjungi 125 ribu orang. Kemudian pada tahun 2016, jumlah pengunjung meningkat menjadi 150 ribu orang. Desa Wisata Panusupan juga telah beberapa kali menyabet penghargaan di tingkat provinsi Jawa Tengah. Namun sangat disayangkan, semenjak dikenal sebagai desa wisata, pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penusupan belum mengalami perkembangan yang berarti. Partisipasi dan bantuan Pemerintah Daerah untuk masyarakat setempat dalam rangka pengembangan desa wisata masih rendah. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 123 ayat (1) dinyatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipasi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Penusupan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah)”. Melalui pemberdayaan masyarakat di desa Penusupan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Desa Wisata.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) Observasi; (2) Wawancara; dan (3) Dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa Penusupan, Anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM), Sekretaris dan Anggota Kelompok Sadar Wisata Penusupan (Pokdarwis), dan Masyarakat Desa Penusupan.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa Wisata

Sebagaimana dinyatakan Pariwisata Inti Rakyat (PIR), bahwa desa wisata adalah suatu kawasan perdesaan dengan keseluruhan suasana yang asli dan khas baik dari kehidupan sosial-ekonomi, sosial-budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, kegiatan perekonomian yang menarik, serta memiliki potensi yang dapat dikembangkan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.

Adapun komponen utama dalam desa wisata menurut Dermantoto (2009) adalah akomodasi dan atraksi. Akomodasi adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Sedangkan atraksi yaitu keseluruhan kehidupan keseharian penduduk

setempat beserta seting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif dalam kegiatan, seperti kursus tari, bahasa, pelatihan kerajinan, dan hal-hal lain yang bersifat spesifik.

Pemberdayaan Masyarakat

Mengacu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, maka Desa Penusupan merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang beragam yang memerlukan pemberdayaan masyarakat. Kata Sumodiningrat, bahwa pemberdayaan masyarakat memerlukan kepedulian yang diwujudkan dalam kemitraan dan kebersamaan pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum berkembang. Dalam hal ini pemberdayaan merupakan suatu proses perubahan ketergantungan menjadi kemandirian. Segenap program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk menanggulangi ketertinggalan merupakan bagian dari upaya mempercepat proses perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih tertinggal. Sedangkan Delivery dalam Sutrisno (2005) menjelaskan bahwa dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa.

Lebih lanjut Mardi Yatmo Hutomo (2000) menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan, yaitu: (1) Bantuan modal; (2) Bantuan pembangunan prasarana; (3) Bantuan pendampingan; (4) Penguatan kelembagaan; dan (5) Penguatan kemitraan. Dalam konteks bantuan modal, sangat penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena apabila tidak ada modal maka masyarakat tidak akan mampu berbuat untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Bantuan pembangunan prasarana, merupakan usaha untuk mendorong masyarakat agar berdaya dan memudahkan mereka untuk melakukan aktivitasnya. Bantuan pendampingan, adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk masyarakat. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman di antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. *Penguatan kelembagaan*, adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya. *Penguatan kemitraan*, adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan

menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang menengah dan besar (Slamet, 2003).

PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata di Desa Penusupan didasarkan pada beberapa kegiatan: (1) Bantuan modal; (2) Bantuan pembangunan prasarana; (3) Bantuan pendampingan; (4) Penguatan kelembagaan; dan (5) Penguatan kemitraan.

Bantuan Modal

Faktor bantuan modal sangat penting dalam pengembangan Desa Penusupan. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Penusupan telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp. 2.208.827.100,- untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan Desa Wisata, terutama untuk pembangunan peningkatan jalan desa, pembangunan peningkatan balai desa, pengembangan pariwisata desa, pelatihan pembinaan kelembagaan, kesenian, kebudayaan, dan keagamaan, penyelenggaraan pelatihan kepemudaan, dan penyelenggaraan festival. Dana Desa tersebut bersumber dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Bagi hasil BUMDesa; (3) Dana Desa; (4) Alokasi Dana Desa; (5) Bantuan Keuangan; (6) APBD Provinsi; dan (7) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Kebumen.

Bantuan modal dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Penusupan dinilai belum mencukupi untuk memberdayakan masyarakat desa. Hal ini antara lain sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang pengrajin cobek batu, bahwa: *“Kalo dari desa ya bantuannya ya paling cuma mesin bubut itu mba, satu set itu, sisanya ya pribadi mba. Dari lahan ya kita sendiri, paling pakai lahan punya keluarga, jadi pribadi”*. Keterbatasan besarnya alokasi dana tersebut dikarenakan selain Desa Penusupan dinilai sudah cukup maju, juga fokus bantuan modal lebih diutamakan pada aspek-aspek yang bersifat pemberian pelatihan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Desa Penusupan:

“Untuk bantuan kepada masyarakat sudah tidak ada di tahun ini, karena menurut data Kabupaten Kebumen sendiri Penusupan ini sudah dibilang desa yang cukup maju dibandingkan desa-desa lainnya. Paling kita pengeluaran untuk pelatihan agar masyarakat lebih terberdaya, apalagi sekarang sudah dibangun objek wisata, kemungkinan untuk masyarakat lain untuk main kesini kan banyak, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini agar pengangguran juga makin teratasi. Misalnya pelatihan bengkel, kan lumayan kan mba, yang nganggur bisa buka usaha bengkel motor, tambal ban, kayak gitu. Terus di objek wisata, mereka bisa jualan, kan kita memfasilitasi warung disana, buat pemandu wisata dan pengelola wisata”.

Hal senada disampaikan Anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD):

“Kita lebih kependataan sih mba, jadi dana-dana yang diberikan itu untuk pelatihan-pelatihan masyarakat. Dananya dari Dana Desa yang berasal dari pusat. Jadi misalnya untuk pelatihan karang taruna di perbengkelan sekitar Rp.7.000.000, untuk pelatihan Ibu PKK Rp. 9.700.000, bantuan operasional LKMD Rp. 5.000.000, pelatihan perangkat desa Rp. 3.000.000, pelatihan BPD Rp. 3.600.000, penanggulangan bencana Rp. 1.000.000. Terus itu mba, untuk yang pengrajin cobek dari desa bentuknya berupa alat bubut, jadi bukan bentuk uang. Sedangkan untuk yang petani disini kan kebanyakan nanam pohon jenitri, ya kita bantuannya bibit pohon. Dananya sendiri untuk beli alat bubut sama bibit tersebut sekitar Rp. 200.000.000”.

Pemberian bantuan modal tersebut juga didukung oleh Kelompok Sadar Wisata Penusupan (POKDARWIS) yang turut berperan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengembangan desa wisata di Desa Penusupan. Terkait bantuan modal, Pemerintah Desa perlu antara lain meningkatkan sosialisasi dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Desa Penusupan maupun melalui kerja sama investasi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, dan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025 pada umumnya dan Kabupaten Kebumen pada khususnya.

Bantuan Pembangunan Prasarana

Bantuan pembangunan prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan berbagai fasilitas di Desa Wisata Penusupan sudah dilakukan, sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Desa Penusupan, bahwa:

“Pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Penusupan ini seperti pembangunan Balai Desa, lapangan senam, jalan menuju objek wisata, kolam renang, mushola, kamar mandi, jalan sepeda gunung, embung, gazebo, sekolah, gedung BUMDES, dan pasar. Semua itu dibangun untuk menunjang pemberdayaan masyarakat. Sarananya ya kayak lampu jalan, pipa paralon, pompa air”.

Hanya saja pembangunan berbagai fasilitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen:

“Dalam pembangunan sarana dan prasarana untuk desa, kita mengkoordinir untuk pembangunan jalan pastinya, karena itu hal yang paling penting. Pembangunan balai pertemuan untuk mempermudah kegiatan dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Terus itu mbak, lampu jalan sebagai penerangan. Di desa kan masih gelap ya mbak, jadi penting itu lampu jalan”.

Terkait bantuan pembangunan prasarana, Pemerintah Desa perlu lebih memprioritaskan pembangunan prasarana yang dinilai penting dan mendesak untuk pengembangan desa wisata.

Bantuan Pendampingan

Bantuan pendampingan merupakan upaya memotivasi, menyadarkan dan mendorong masyarakat desa untuk mengenali potensi dan masalah yang ada. Bantuan pendampingan umumnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kerjasama Desa maupun oleh Kepala Desa Penusupan. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan bahwa:

"Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini ya hanya mendampingi, mendampingi dari awal pembentukan kegiatan sampai tercapainya kegiatan yang diinginkan. Jadi kita ada kelompok kadernya mbak, seperti yang telah dijalankan saat ini, pendampingan yang dilakukan seperti mendampingi proses pengembangan Desa Wisata Penusupan menjadi objek wisata yang banyak diminati pengunjung warga Kebumen. Kepala Desa Penusupan saya ajak ke objek wisata lain untuk melihat bagaimana pemanfaatan potensi yang menarik, agar Penusupan menonjolkan keunikan yang belum ada di wisata lainnya".

Sementara Kepala Desa Penusupan mengemukakan bahwa bantuan pendampingan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

"Pendampingan yang saya lakukan ya dengan mendampingi pengelola maupun warga bagaimana mengelola objek wisata yang dibangun, mendampingi program air bersih yang baru saja diterapkan, program sehat lansia, ibu hamil dan anak. Di desa ini juga ada pembentukan kelompok kader mbak, nanti kader-kader itu turun ke setiap warga. Buat sosialisasi sama pengecekan lingkungan sehat. Kalau lingkungannya bersih dan sehat kanarganya juga sehat-sehat ya mbak. Terus lewat RW sama RT mbak, mereka yang paling bisa sering ketemu samaarganya".

Sementara menurut salah satu warga yang membuka warung di Desa Penusupan tentang pendampingan dari pemerintah mengemukakan bahwa: "*Kalo soal pendampingan ya mbak, dari desa itu lewat kader gitu, terus lewat RW atau RT. Biasanya dari mereka yang mendampingi langsung di kegiatan desa*". Kemudian menurut salah satu pengrajin cobek batu di Desa Penusupan mengatakan bahwa:

"Pendampingan dari desa sendiri kalau ke pengrajin seperti saya sih tidak ada pendampingan khusus ya mbak. Paling cuma didampingi kalau mau ada pameran dimana gitu, misalnya kemarin di Kebumen Expo, dari desa ikut mendampingi buat memperkenalkan cobek batu ini ke masyarakat lain.

Ngasih tau ke pengunjung tentang kualitasnya dan produknya. Cobek ini kana da ulekannya, lumpang (tempat untuk menumbuk) sama alu (alat penumbuk)”.

Berdasarkan uraian di atas, bantuan pendampingan ditujukan untuk menciptakan, mengkondisikan iklim kelompok yang harmonis, serta memfasilitasi terjadinya proses saling kerja sama dalam kelompok (Sugiyanto, 2018). Tidak hanya sampai pada tahap pelaksanaan pemberdayaan, peran pendamping juga dituntut berlanjut pasca pendampingan yaitu sebagai katalisator yaitu sebagai penghubung antara kelompok pendampingan (masyarakat) dengan lembaga atau organisasi di luar kelompok, seperti lembaga pelayanan keterampilan. Meskipun bantuan pendampingan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini sudah berjalan cukup baik, namun Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian organisasi melalui pengukuran dan perbandingan hasil-hasil bantuan pendampingan yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Pengendalian dilakukan dalam bentuk tata laksana, yaitu: manual, standar kriteria, norma, instruksi, dan lain-lain prosedur.

Penguatan Kelembagaan

Beberapa lembaga yang berkaitan dengan pengembangan Desa Penusupan adalah RT, RW, Pemerintah Desa Penusupan, Pemerintah Kecamatan Sruweng, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, dan desa wisata lain. Namun lembaga yang berhubungan langsung dengan pengembangan Desa Wisata Penusupan adalah Pokdarwis dan pengelola desa wisata. Hal ini sebagaimana dikemukakan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa: *“Dari kelembagaannya itu diperkuat dari bawah mbak. Jadi seperti RT, RW, Dusun, dan sebagainya diarahkan agar mereka mampu memberdayakan warganya. Terus lembaga yang bekerja sama ya dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Lalu kantor dinas yang saling berkaitan tentunya”*. Sedangkan Kepala Desa Penusupan mengemukakan sebagai berikut:

“Jadi di Desa Penusupan ini penguatan lembaganya dengan cara memberi arahan kepada lembaga-lembaga desa yang ada. Kita ada pertemuan rutin dengan lembaga desa seperti RT, RW, Kepala Dusun dan lainnya untuk mensosialisasikan bagaimana memberdayakan warganya untuk lebih kreatif, inovatif, dan memberi solusi dari permasalahan yang ada”.

Sementara Anggota Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Desa Penusupan, mengatakan bahwa: *“Kelembagaan di Penusupan ini diperkuat melalui sosialisasi dan pengarahan ke setiap lembaganya. Lembaga di desa kan cuma RT, RW, Kepala Dusun, BPD dan serupanya. Nah nanti mereka diarahkan bagaimana sih memberdayakan warganya. Dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, begitu mbak”*.

Dari berbagai lembaga yang telah disebutkan di atas, semua lembaga yang terkait dengan pengembangan Desa Penusupan umumnya telah melakukan penguatan kelembagaan secara baik terutama perannya sebagai media musyawarah,

namun terkait upaya penguatan kapasitas dan struktur kelembagaan belum dilakukan secara optimal.

Penguatan Kemitraan

Penguatan kemitraan dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Penusupan adalah kemitraan yang terjalin antara aparat pemerintahan Desa Penusupan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PLN, dan Perhutani. Hal ini sebagaimana dikemukakan Kepala Desa Penusupan:

“Desa ini bekerjasama dengan beberapa kemitraan mbak, baik pemerintah maupun swasta. Dari listrik kerjasama dengan PLN, air bersih kerjasama dengan PSPAM, objek wisata dengan POKDARWIS Kebumen dan Perhutani, dan biji jenitri dengan swasta asing. Jadi kemitraan di desa ini bisa dikatakan sudah cukup mumpuni lah mbak”.

Sedangkan Sekretaris Pokdarwis Desa Penusupan, mengemukakan sebagai berikut:

“Penusupan ini baru bekerjasama dengan PLN dan Perhutani. PLN pastinya untuk listrik, dan Perhutani sendiri karena kita menggunakan lahan pemerintah yaitu hutan pinus. Jadi nantinya kita bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari objek wisata ini. Bagi hasilnya ya kira-kira 70% untuk kita, 30% untuk perhutani. Kita juga harus menjaga hutan agar tidak rusak, nggak sembarangan buka lahan untuk objek wisata. Ada perjanjiannya juga”.

Kemitraan yang telah terjalin selama ini umumnya dilakukan dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Ke depannya, penguatan kemitraan perlu diperluas dengan lembaga atau institusi lain baik lembaga finansial maupun non finansial. Kerjasama dengan lembaga finansial dilakukan terkait dengan penyediaan modal kerja. Sedangkan kerjasama dengan lembaga non finansial dilakukan dengan lembaga penelitian dan pengembangan universitas atau pemerintah terkait pengelolaan desa wisata. Dengan demikian kerjasama yang dibangun oleh kelembagaan Desa Penusupan dengan lembaga lain diharapkan akan berdampak terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata di Desa Penusupan umumnya telah dilakukan secara cukup baik. Kegiatan bantuan modal hanya diberikan dalam bentuk prasarana penunjang pengembangan desa wisata. Kegiatan bantuan pembangunan prasarana belum ada prioritaskan pada pembangunan prasarana yang dinilai penting dan mendesak untuk pengembangan desa wisata. Kegiatan bantuan pendampingan belum dilakukan secara langsung dan rutin. Kegiatan penguatan kelembagaan lebih ditekankan pada perannya sebagai

media musyawarah. Kegiatan penguatan kemitraan lebih ditekankan pada kerjasama dengan lembaga atau institusi yang bersifat finansial (Anwas, 2013).

Rekomendasi

Dari simpulan yang telah dikemukakan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan perlu melakukan pengendalian organisasi dengan cara meningkatkan intensitas dan rutinitas pendampingan pada seluruh kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Penusupan.
- b. Pemerintah Desa Penusupan perlu mensosialisasikan dan melibatkan BUMDes serta kerjasama investasi dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Pemerintah Desa Penusupan perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga finansial maupun melibatkan berbagai lembaga non finansial dalam meningkatkan pengelolaan desa wisata.
- d. Pemerintah Desa Penusupan perlu melakukan pengendalian organisasi melalui peningkatan kapasitas dan struktur kelembagaan khususnya pada Pokdarwis maupun pengelola Desa Wisata Penusupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, M, Oos. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Dermantoto, Argyo. (2009). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Air Terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
- Dinas Pariwisata DIY. (2014). *Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY. Laporan Akhir*. DIY: Dinas Pariwisata DIY.
- Hutomo, Mardi Yatmo. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Bappenas.
- <https://www.kompasiana.com/ummyhanikarifin/5c73a5cfaeebe149705b0b65/besarnya-potensi-wisata-indonesia>.
- <https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/wisata-indonesia-di-mata-dunia>.
- <https://kebumen.sorot.co/berita-3788-miliki-banyak-potensi-desa-penusupan-bakal-dijadikan-desa-wisata.html>.

<https://klikanggaran.com/komunitas/panorama-menakjubkan-di-desa-wisata-penusupan.html>.

<https://inovasidesa.kemendesa.go.id/desa-wisata-panusupan-tawarkan-panorama-ketinggian-dan-eksotisme-rumah-pohon/>.

Slamet, Margono. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno. (2005). *Pencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. CV Citra Utama.

Sugiyanto, Eko. (2018). *Pengendalian Dalam Organisasi. Edisi Revisi*. Jakarta: LPU-Universitas Nasional.